

Implementasi Kebijakan Manajemen Mutu Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Siswa di SMP Negeri 7 Muaro Jambi Dan SMP Negeri 11 Muaro Jambi

Atika Zuliani¹, Luthfi Afif Chaifi², Aldi Syahputra Rambe³, Dwi Indriyana⁴, Fitriani⁵

^{1,2,3,4,5} Mahasiswa S1 Administrasi Pendidikan Universitas Jambi

Correspondence Email: atikazuliani26@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan manajemen mutu dalam penguatan pendidikan karakter di SMP N 7 Muaro Jambi dan SMP N 11 Muaro Jambi. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus, jenis kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP N 7 dan SMP N 11 Muaro Jambi hampir sama dalam kualitas mutu pendidikan baik dari visi dan misi, program, maupun penerapan dari program itu sendiri. Sementara itu, kendala yang dihadapi dari kedua sekolah ini adalah belum ada dukungan sistem informasi dalam penyelenggaraan pendidikan karakter yang sistematis.

Kata Kunci: Implementasi mutu, Pendidikan karakter, Manajemen mutu

Abstract: The aim of this research is to determine the implementation of quality management policies in strengthening character education at SMP N 7 Muaro Jambi and SMP N 11 Muaro Jambi. The method used is the case study method, a descriptive qualitative type through observation, interviews and document analysis. The results of the research show that SMP N 7 and SMP N 11 Muaro Jambi are almost the same in terms of educational quality, both in terms of vision and mission, programs, and implementation of the program itself. Meanwhile, the obstacle faced by these two schools is that there is no information system support for implementing systematic character education.

Keywords: Quality implementation, Character education, Quality management

PENDAHULUAN

Pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam pembentukan pribadi dan moral siswa. Dalam era globalisasi ini, pendidikan karakter tidak hanya tentang transfer pengetahuan akademik, tetapi juga tentang membentuk nilai-nilai positif dan sikap yang baik dalam diri siswa. Namun, implementasi pendidikan karakter di sekolah seringkali menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang perlu dipahami lebih dalam.

Kebijakan manajemen mutu di sektor pendidikan menjadi semakin penting dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pengawasan, evaluasi, dan perbaikan terus-menerus dalam manajemen mutu dapat berdampak positif pada penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana kebijakan manajemen mutu ini dapat diintegrasikan dengan pendidikan karakter siswa.

SMP Negeri 7 Muaro Jambi dan SMP 11 Muaro Jambi mungkin menghadapi tantangan yang berbeda dalam mengimplementasikan pendidikan karakter. Faktor-faktor seperti lingkungan sosial, budaya sekolah, dan peran guru dapat berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan pendidikan karakter. Oleh karena itu, studi tentang implementasi pendidikan karakter di dua sekolah ini dapat memberikan wawasan yang berharga.

Pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan manajemen mutu dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat pendidikan karakter siswa dapat memberikan pandangan yang lebih holistik tentang upaya perbaikan pendidikan di sekolah. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana integrasi antara manajemen mutu dan pendidikan karakter telah terjadi di SMP Negeri 7 Muaro Jambi dan SMP 11 Muaro Jambi.

Penelitian ini juga relevan dalam konteks upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dengan memahami bagaimana manajemen mutu dapat mendukung penguatan pendidikan karakter, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan pendidikan di tingkat nasional, sehingga pendidikan karakter dapat menjadi bagian integral dari sistem pendidikan Indonesia yang lebih baik.

LANDASAN TEORI

Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan yang bertujuan untuk membentuk siswa menjadi individu yang memiliki karakter yang baik dan bermoral (Delima, 2023), serta sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Penerapan pendidikan karakter diharapkan mampu membekali siswa dengan kemampuan-kemampuan dasar yang tidak saja mampu menjadikan lifelong learners sebagai salah satu karakter penting untuk hidup di era globalisasi, tetapi juga mampu berfungsi dengan peran serta positif, baik sebagai pribadi, anggota keluarga, warga negara, maupun warga dunia. Pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah untuk memberikan keputusan baik-buruk, keteladanan, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.

Pendidikan karakter sebagai upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk menanamkan nilai-nilai perilaku peserta didik yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.

Implementasi pendidikan karakter memiliki makna yang lebih tinggi, karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan masalah benar atau salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan, sehingga peserta didik memiliki kesadaran, kepekaan, dan pemahaman, serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebijakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang berkarakter merupakan sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara bermoral, yang diwujudkan dalam tindakan nyata melalui perilaku baik, jujur, ikhlas, bertanggungjawab, hormat terhadap orang lain dan nilai-nilai karakter mulia lainnya.

Menurut Kemendikbud fungsi utama pendidikan karakter adalah (1) membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural; (2) membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia, mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik; (3) membangun sikap warganegara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni. Sedangkan fungsi dari pendidikan karakter menurut Heri Gunawan adalah (1) mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik; (2) memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multi kultur; (3) meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Pendidikan karakter memiliki urgensi yang tinggi bagi perkembangan karakter pelajar. Pembentukan nilai-nilai karakter pada remaja sangat penting dalam upaya menangkal pengaruh negatif yang dapat merusak karakter remaja sebagai generasi penerus bangsa.

Manajemen Mutu

Menurut Sagala (2010) bahwa sekolah yang berhasil dalam meningkatkan mutu pendidikannya ditentukan oleh faktor-faktor antara lain: (1) Perumusan Visi, Misi dan Tujuan Sekolah; (2) Evaluasi Diri Sekolah; (3) Peranan kepala sekolah; (4) Peningkatan Mutu Guru, yakni :

1. Kebijakan Pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan hal yang sangat penting, terutama kebijakan yang berlaku secara nasional, seperti kurikulum dan ujian nasional, termasuk kebijakan distribusi dan rekrutmen guru.
2. Kepemimpinan. Kepemimpinan (*leadership*) kepala sekolah juga berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Seorang kepala sekolah harus mampu menjalankan manajemen berbasis sekolah (*school based management*) secara baik dan maksimal. Ekosistem pendidikan di lingkungan sekolah harus berjalan berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang diterapkan. Gaya kepemimpinan yang baik, transparansi keuangan, hubungan antara guru dengan kepala sekolah, hubungan orang tua dengan guru, maupun hubungan guru dengan siswa dan seluruh yang ada di satuan pendidikan harus berjalan dengan lancar dan harmonis. Kepala sekolah yang memiliki kreativitas dan inovasi yang bagus, dapat membuat sekolah yang dipimpinnya menjadi lebih bagus juga. Karena itulah, maka Kemendikbud juga fokus pada reformasi manajemen sekolah.

3. Infrastruktur. Komponen ketiga adalah infrastruktur, yaitu sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kelas, laboratorium, maupun teknologi informasi dan komunikasi. Semua sarana dan prasarana tersebut berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan. Apalagi sekarang dunia tanpa batas, peserta didik dapat belajar tidak hanya dari guru dan buku yang ada, melainkan bisa belajar dari media sosial.

Proses Pembelajaran. Komponen keempat yang tidak kalah pentingnya dalam peningkatkan mutu pendidikan adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang menyenangkan, yang berinovasi dan penuh kreativitas akan mendorong peserta didik terbangun motivasinya. Akan tetapi, proses pembelajaran juga tergantung dari potensi guru, kecakapan guru, dan kemampuan guru. Proses pembelajaran yang mendorong kreativitas juga mendukung untuk memenuhi empat kompetensi yang harus dimiliki generasi bangsa dalam menghadapi tantangan abad 21.

Sementara itu,a da 4 *problem* yang dirasa cukup krusial dalam masalah peningkatan mutu sekolah yakni diantaranya:

1. Kualitas guru. Bisa dikatakan guru – guru di Indonesia sudah cukup luas. Namun dalam hal ini persebaran guru yang tidak merata juga menjadi polemik dalam pendidikan. Ditambah juga adanya para tamatan muda di bidang pendidikan yang pada saat di letakkan di lapangan untuk mengajar secara langsung mengalami shock ketika di hadapkan dengan siswa. Hal ini mungkin saja terjadi karena, di dunia kampus praktek mengajar langsung ini kurang dan mereka lebih cenderung mendengarkan dosen di kelas. Sehingga untuk penerapan dari teori belajar yang mereka garap itu minim.
2. Kurikulum yang rumit. Kurikulum juga sangat sering dijadikan kambing hitam permasalahan pendidikan hingga adanya anggapan bahwa “*ganti menteri ganti kurikulum*” hal ini tidak semua nya salah dimana seperti yang kita ketahui bahwa pada awal mulanya pada tahun 1975 kurikulum lahir karena adanya pengaruh dalam bidng MBO (*managemen by objective*). Kemudian pada tahun 1984 berganti lagi yang mana tahun ini dikenal dengan sbeutan “kurikulum 1975 disempurnakan”. Kemudian di ganti lagi pada tahun 1994 di damana dalam penerapan kurikulum ini memadu padan kan kurikulum 1975 dan 1984. Hingga setelahnya muncul pula kurikulum 2004 yang berupa kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Pada tahun 2006 berganti kembali dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Hingga pada akhirnya setelah KTSP berganti pula pada thun 2013 yang dikenal dengan nama Kurikulum 2013.
3. Anggaran pendidikan. Dalam UUD 1945 diamanatkan bahwa anggaran pendidiakn minimal 20%. Hal ini cukup menaikkan anggra pendidikan secara signifikan pada tahun 2009. Namun kemungkinan besar bahwa anggaran pendidikan ini tidak serta merta diimbangi dengan pemetaan isu – isu strategis pendidikan. Sehingga dalma hal ini kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) belum tergarap secara optimal.
4. Regulasi pendidikan. Banyak UU yang membahas mengenai pendidikan rentan terjadi salah tafsir dalam penerapannya. Seperti yang terjadi pada rntang tahun 2003 hingga 2009 setidaknya muncul 3 UU pendidikan setelah UU SISDIKNAS yang ada di tahun 2003.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode studi kasus untuk mengekplorasi mengenai sebuah system terikat. Penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data secara teoritis dengan menkaji bahan kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di SMA N 7 Muaro Jambi dan SMP N 11 Muaro Jambi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informasi dalam proses wawancara adalah Waka Kurikulum dan Waka Kesiswaan di masing-masing sekolah tersebut, 3 orang siswa, dan 3 prang wali murid.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pendidikan Karakter

Visi sekolah di SMP Negeri 7 Muaro Jambi merupakan gambaran peran lembaga di masa depan dan wujud komitmen bersama. Visi sekolah bersumber pada empat hal yaitu Siswa Yang Unggul, berPrestasi, berwawasan,lingkungan, berakhhlak mulia berdasarkan iman dan taqwa. tujuan pendidikan nasional. Rumusan visi dan misi menggambarkan peran sekolah dalam situasi global. Visi SMP Negeri 11 Muaro jambi disusun sederhana, jelas serta mencerminkan kondisi empirik sekolah dan karakter sekolah mudah

dipahami. Para guru terbiasa dengan kondisi keanekaragaman. dan mendorong keterlibatan karena lebih realistik.

Perumusan masalah dalam kebijakan pendidikan karakter di SMP Negeri 7 Muaro Jambi melibatkan pihak internal dan perwakilan orang tua yang menjadi sukarelawan atau bersedia membantu penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah. Penetapan kebijakan dalam pendidikan karakter disesuaikan dengan visi dan misi, pihak Sekolah telah merancang sistem pengelolaan sekolah dan rambu-rambu dalam kebijakan pendidikan karakter. Alternatif kebijakan pendidikan karakter disusun secara sederhana berdasarkan skala prioritas, analisis relevansi dengan kegiatan utama yaitu pendidikan karakter yang mencerminkan identitas sebagai peserta didik yang memiliki pemahaman, sikap hidup dan perilaku seperti ajaran yang berwawasan global.

Kegiatan sebagai realisasi kebijakan pendidikan karakter cukup beragam antara lain kegiatan rutin, spontan, dan keteladanan yang baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak terlepas dari peran guru serta sistem yang mendorong motivasi serta komitmen guru. Sumber daya yang tersedia menentukan bagaimana implementasi program pendidikan karakter. Pemantauan hasil kebijakan tidak hanya dilakukan oleh kepala sekolah bersama guru, serta orang tua yang menjadi relawan sekolah.

Pemantauan hasil kebijakan kepala sekolah dilakukan oleh perwakilan dari sekolah terutama terkait dengan budaya humanis yang didoktrinkan, disosialisasikan kepada para peserta didik, guru maupun para orang tua. Pemantauan dilakukan terhadap tindakan atau perilaku guru dalam pelaksanaan kebijakan, respon guru terhadap kebijakan, dukungan orang tua, perilaku para peserta didik maupun dukungan kantor pusat terhadap pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan evaluasi kebijakan pendidikan karakter ditujukan guna memperoleh perhatian khusus baik dari pihak sekolah, pemerintah serta para orangtua dan didukung oleh sistem pendidikan karakter yang sudah mapan. Hasil evaluasi disampaikan secara nonformal kepada sekolah. Hasil formal evaluasi kepada sekolah pusat dilakukan oleh tim unit jaminan mutu sebagai hasil audit.

Masalah-masalah dalam kebijakan pendidikan karakter di SMP Negeri 11 Muaro Jambi diidentifikasi dan dicari bersama melalui rapat formal yang diselenggarakan sekolah. Rapat melibatkan kepala sekolah, beberapa guru senior di lingkungan sekolah mulai dari tingkat TK sampai dengan SMA/SMK. Untuk kebijakan pendidikan masing-masing tingkat disusun berdasarkan hasil rapat bersama. Formula kebijakan dalam pendidikan karakter dirumuskan bersama antara kepala sekolah, guru senior. Perkiraan alternatif-alternatif kebijakan tidak dilakukan dengan menggunakan sejumlah metode baik argumentasi rasional maupun berdasarkan teknik analisis tertentu dalam upaya memperoleh suatu keyakinan bahwa pilihan kebijakan lebih baik dari yang lain (alasan pilihan rasionalitas). Estimasi hanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan sederhana yaitu dengan teknik brainstorming dan forum discussion group. Kegiatan pendidikan karakter sebagai realisasi dari kebijakan pendidikan karakter antara lain memberikan pelajaran karakter di kelas sesuai dengan tema bulan dengan cara bercerita sebelum pelajaran dimulai, adanya perayaan hari besar agama, mendekorasi ruangan sesuai dengan hari-hari besar keagamaan dan ceramah keagamaan sebagai bentuk toleransi.

Pada dasarnya setiap kegiatan ditujukan untuk mengembangkan toleransi terhadap perbedaan agama dan saling menghormati. Kegiatan pendidikan karakter yang diselenggarakan di kelas tidak ada yang khusus, kecuali menempelkan tulisan-tulisan hasil karya siswa tema-tema bulan karakter disampaikan 15 menit sebelum pelajaran dimulai. SMP Negeri 11 Muaro Jambi tidak memiliki unit, tim kerja atau lembaga yang memantau bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam pendidikan karakter. Pemantauan hasil-hasil kebijakan pendidikan karakter dilakukan bersama-sama tetapi tidak secara formal didokumentasikan hasil pemantauan tersebut.

Dari pemantauan yang dilakukan baik oleh guru, kepala sekolah di SMP Negeri 11 Muaro Jambi terhadap kinerja kebijakan pendidikan karakter antara lain relevansi pemantauan dengan kebijakan, pemantauan fokus pada tujuan yaitu peserta didik yang memiliki karakter, pemantauan fokus pada perubahan pasca implementasi kebijakan. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan pendekatan pemeriksaan sosial. Kepala sekolah, guru secara eksplisit melakukan pemantauan terhadap hubungan antara masukan, proses dan keluaran serta dampak dari kebijakan pendidikan karakter. Pemantauan dilakukan mulai dari awal sampai dengan diterimanya kebijakan oleh peserta didik (dirasakan oleh para peserta didik).

Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pemantauan terhadap perubahan yang terjadi dengan adanya kebijakan seperti adanya bulan karakter, perayaan peristiwa keagamaan maupun pengembangan pada pengajaran dan pembelajaran untuk menanamkan rasa toleransi terhadap perbedaan dan keanekaragaman.

Sifat evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun para guru terhadap kebijakan dalam pendidikan karakter fokus pada nilai kebijakan dan program. Meskipun tidak secara formal dinyatakan dalam bentuk tertulis kriteria evaluasi terhadap kebijakan, pada dasarnya semua sepakat bahwa salah satu kriteria evaluasi kebijakan pendidikan karakter serta program yang diselenggarakan adalah efektivitas kebijakan memecahkan masalah-masalah pendidikan karakter. Kebijakan pendidikan karakter yang efektif dapat mempengaruhi pembentukan lulusan SMP yang memiliki rasa toleransi tinggi terhadap keanekaragaman serta memiliki karakter. Pendekatan evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun guru dapat dikelompokkan berdasarkan asumsi yang mendasarinya yaitu ukuran manfaat atau nilai akan terbukti dengan sendirinya apabila kebijakan yang digulirkan sekolah efektif. Salah satu cara untuk memastikan bagaimana kinerja kebijakan adalah dengan menggunakan pemeriksaan sosial dengan fokus pada kehidupan sosial di sekolah terutama bagaimana perilaku para peserta didik di sekolah serta bagaimana respon guru dalam melaksanakan kebijakan kepala sekolah.

Evaluasi semu yang dilakukan oleh kepala sekolah cukup terbatas. Hal ini disebabkan adanya kesibukan serta kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Informasi hasil-hasil evaluasi kebijakan hanya disebarluaskan dan dikomunikasikan secara terbatas dalam bentuk lisan. Pencarian Masalah (problem solving search) dilakukan secara bersama-sama dengan peran kepala sekolah yang dominan. Identifikasi dan pencarian masalah dilakukan agar kebijakan pendidikan karakter dapat berjalan secara efektif. Estimasi adalah perkiraan-perkiraan yang disusun berdasarkan hasil perumusan masalah serta identifikasi kebutuhan para peserta didik. Estimasi formula kebijakan disusun berdasarkan informasi hasil perumusan masalah yang relevan. Kegiatan pendukung sebagai realisasi dari kebijakan kepala sekolah adalah kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan OSIS. Pelaksanaan kebijakan mendapatkan pengawasan dan supervisi langsung dari sekolah. Kegiatan yang menjadi sarana untuk pendidikan karakter adalah kegiatan pramuka dan Osis.

Program dan Implementasi

SMP Negeri 7 Muaro Jambi adalah sekolah untuk Semua kalangan. Anggaran tidak menjadi kendala dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Salah satu kendala dalam SDM adalah kualitas kepribadian guru sebagai tenaga pendidik. Sekolah harus memastikan bahwa para peserta didik belajar bersama guru yang tepat dan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, untuk menjamin mutu guru, sekolah hanya menerima guru-guru yang telah memenuhi kualifikasi terutama dalam soal bahasa dan pemahamannya tentang pendidikan. Implementasi program pendidikan karakter di SMP Negeri 7 Muaro Jambi, selain memiliki jam pelajaran khusus di setiap kelas setiap minggunya juga ada kegiatan yang sifatnya spontan dan hasil kreativitas guru. Keberhasilan program pendidikan karakter maupun kegiatan penunjang akan berhasil dengan adanya sumber daya yang memadai baik dari aspek anggaran, SDM, sistem, kerjasama antara guru dengan kepala sekolah, kerjasama guru dengan unit penjaminan mutu.

Salah satu sumber daya yang dioptimalkan oleh sekolah adalah kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Struktur organisasi dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di SMP Negeri 7 Muaro Jambi menunjukkan bahwa struktur organisasi lebih mapan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kerangka kerja dalam struktur organisasi tersebut. Fungsi kepala sekolah, guru, koordinator budaya humanis, unit penjaminan mutu yang dibentuk dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan karakter kepada pusat secara jelas dinyatakan dalam struktur tersebut. Rencana kerja untuk menyelenggarakan pendidikan karakter dan penekanan budaya humanis sesuai. Sistem informasi kebijakan diakui memang masih belum optimal digunakan sebagai upaya membangun kesepahaman dalam kebijakan. Segala hal yang menyangkut aspek internal dan eksternal yang berupa informasi dan data belum disajikan dalam sistem informasi tersebut.

Keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 11 Muaro Jambi dipengaruhi oleh beragam faktor seperti SDM pengelola pendidikan karakter, pelaksana maupun dukungan sumber daya baik anggaran maupun keterlibatan orang tua. Anggaran untuk kebutuhan sekolah sudah disusun sebelum awal tahun ajaran baru. Usulan pengadaan anggaran atau perbaikan pada fasilitas belajar sudah termasuk

pendidikan karakter diajukan pada tahun ajaran baru. Sampai saat ini, sekolah belum ada anggaran khusus untuk pendidikan karakter. Penyelenggaraan pendidikan seperti perayaan hari besar, bulan karakter yang diikuti dengan penyampaian cerita tentang karakter, pelatihan bagi guru dan staf belum memiliki sistem dokumentasi. Proses komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan karakter diantara guru dan kepala sekolah lebih bersifat nonformal. Dukungan fasilitas menurut kepala sekolah cukup memadai. Lebih lanjut dijelaskan bahwa anggaran yang tersedia mencukupi kebutuhan anggaran dalam penyelenggaraan pendidikan karakter.

Proses penyelenggaraan pendidikan karakter tidak memerlukan prosedur yang rumit. Kepala sekolah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Pihak yayasan melakukan pengawasan dari sisi anggaran walaupun tidak secara rutin dilakukan. Anggaran yang cukup besar hanya dari pelatihan yang diselenggarakan sekolah. Proses pengorganisasian pekerjaan sudah menjadi rutinitas. Pembagian kerja hanya dilakukan diantara para guru dan wali kelas. Guru bertanggung jawab terhadap kegiatannya masing-masing dan menyampaikan pertanggungjawaban kepada kepala sekolah secara lisan. Belum ada dukungan struktur organisasi yang menjelaskan tentang prosedur pertanggungjawaban, maupun pembagian tugas dan pekerjaan dalam pengelolaan pendidikan karakter. Dukungan sistem informasi dalam kebijakan sebagai upaya untuk membangun kesepahaman mengenai kebijakan terutama pada tingkat operasional sangat diperlukan. Informasi tidak hanya diperlukan tetapi perlu dikendalikan. Dalam praktiknya sistem pengendalian infiormasi belum berjalan di SMP Negeri 11 Muaro Jambi. Belum ada dukungan sistem informasi dalam penyelenggaraan pendidikan karakter yang sistematis. Biasanya para guru memperoleh informasi dari rapat atau pertemuan di sekolah.

Permasalahan dalam Sistem Pendidikan karakter

Di SMP Negeri 7 Muaro Jambi, anggaran, SDM serta sistem tidak menjadi kendala dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Dukungan orang tua siswa cukup tinggi terhadap penyelenggaraan kegiatan belajar. Keterbatasan kualitas SDM dalam melakukan riset tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah lain. SMP Negeri 7 Muaro Jambi adalah salah satu sekolah yang memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Belum ada riset-riset yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah tersebut.

Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Pendidikan Karakter

Berdasarkan hasil studi dokumentasi mengenai program-proram pendidikan serta agenda pendidikan SMP Negeri 7 Muaro Jambi diketahui bahwa program berubah setiap tahun. Keputusan usulan program berada di kepala sekolah dan keputusan program ada di pihak Sekolah. Selama ini, sepanjang kegiatan atau program memiliki argumentasi relevansi dengan pendidikan karakter dan sebagai bagian dari berkembangnya budaya humanis, program tersebut disetujui. Dilihat dari jumlah dan tujuan, program pada tahun 2015 lebih spesifik dan tujuan lebih jelas (*Clarity Program*), mendorong keterlibatan orang tua dan program lebih variatif. Pengembangan program diikuti dengan pengembangan penjaminan mutu oleh tim penjamin mutu sekolah. Sekolah mengembangkan kualitas program dari mulai input seperti anggaran, dukungan orang tua maupun pihak sekolah, perhatian dan motivasi para siswa. Sekolah mengembangkan kualitas pada proses pelaksanaan kegiatan seperti kualitas dalam pengorganisasian program, peningkatan komitmen partisipasi aktif guru dalam proses, peningkatan ketertarikan dan keterlibatan siswa serta bagaimana orang tua terlibat dalam proses tersebut.

Koordinasi dan komunikasi antara pengambil kebijakan dengan unit penjamin mutu dilakukan secara formal. Hasil audit disampaikan kepada kepala sekolah untuk tindakan korektif dan untuk temuan-temuan yang bersifat prinsip dan dapat menghambat proses penyelenggaraan pendidikan biasanya dikonsultasikan pihak sekolah untuk tindakan selanjutnya. Unit penjamin mutu di sekolah SMP Negeri 7 Muaro Jambi memiliki fungsi dan wewenang untuk menjaga agar penyelenggaraan pendidikan karakter tetap berada pada tujuannya serta berada pada batas toleransi kriteria yang telah ditetapkan serta mengajukan rekomendasi untuk tindakan korektif. Unit penjamin mutu merumuskan konsep penjaminan mutu pendidikan karakter, perbaikan serta menjamin bahwa setiap kegiatan memiliki standar mutu yang telah ditetapkan. Unit penjaminan mutu adalah institusi fungsional yang bertugas untuk mendukung kegiatan pendidikan karakter di sekolah dalam memberikan jaminan kualitas kepada pelanggan. Unit penjaminan mutu di SMP Negeri 7

memiliki tugas membantu kepala sekolah mengembangkan konsep penjaminan mutu serta sistem dokumentasi kegiatan pendidikan karakter baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung. Unit penjamin mutu mengkoordinir pelaksanaan dan pengawasan sistem penjaminan mutu pendidikan karakter serta melaporkan kegiatan tersebut kepada sekolah secara berkala.

Unit penjamin mutu pendidikan karakter menggunakan hasil audit internal penyelenggaraan pendidikan karakter untuk menerapkan sistem kewaspadaan lebih awal serta memberikan supervisi dan pelatihan yang terkait dengan penjaminan mutu terhadap para guru dan staf. Kegiatan dan program yang terkait dengan pendidikan karakter menujadi tugas unit penjaminan mutu di sekolah. Di SMP Negeri 11 Muaro Jambi tidak ada unit penjaminan mutu internal yang dilakukan. Penjaminan mutu hanya mengacu pada standar mutu lulusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. SMP Negeri 11 tidak memiliki sistem penjaminan mutu internal secara formal. Guru, kepala sekolah, para staf serta kredibilitas sekolah adalah variabel yang menjamin bahwa sekolah memiliki karakteristik yang berbeda terutama dari aspek pendidikan karakter yang sangat toleran terhadap keanekaragaman. Persyaratan umum dan persyaratan dokumentasi yang menggambarkan pernyataan tentang kebijakan mutu dalam pendidikan karakter belum didukung oleh panduan kualitas, prosedur tertulis dalam penyelenggaraan pendidikan karakter maupun dokumen-dokumen yang diperlukan guna menjamin mutu. Dokumen yang menyatakan hasil pendidikan karakter masih bersifat umum.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa SMP N 7 dan SMP N 11 Muaro Jambi hampir sama dalam kualitas mutu pendidikan baik dari visi dan misi, program, maupun penerapan dari program itu sendiri. Sementara permasalahan yang belum diketahui adalah belum adanya riset tentang permasalahan yang terjadi pada karakter siswa di SMP N 7 Muaro Jambi. Begitu juga dengan kendala-kendala lain yang terjadi misalnya: Belum ada dukungan sistem informasi dalam penyelenggaraan pendidikan karakter yang sistematis. Disisi lain juga untuk di SMP N 11 Muaro Jambi belum adanya penjamin mutu internal sekolah. Sementara itu di SMP N 7 Muaro Jambi, Unit penjaminan mutu memiliki tugas membantu kepala sekolah mengembangkan konsep penjaminan mutu serta sistem dokumentasi kegiatan pendidikan karakter baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung. Unit penjamin mutu mengkoordinir pelaksanaan dan pengawasan sistem penjaminan mutu pendidikan karakter serta melaporkan kegiatan tersebut kepada sekolah secara berkala.

DAFTAR RUJUKAN

- Ade, S. (2020). *Implementasi manajemen mutu terpadu di mts negeri 2 Bandar lampung* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Budimansyah, Dasim (2010). Pendidikan Karakter, Bandung. Alfabeta.
- Firdaus, E., Purba, R. A., Kato, I., Purba, S., Aswan, N., Karwanto, K., & Chamidah, D. (2021). Manajemen Mutu Pendidikan. Yayasan Kita Menulis.
- Hadis, A., & Nurhayati, B. (2012). Manajemen mutu pendidikan.
- Hanun, A. (2014). Manajemen mutu pendidikan.
- Harun, C. Z. (2013). Manajemen pendidikan karakter. *Jurnal pendidikan karakter*, 4(3).
- Ismail, F. (2018). Implementasi total quality management (TQM) di lembaga pendidikan. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 10 (2).1-16
- Sudrajat, A. (2011). Mengapa pendidikan karakter?. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1).